

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 520/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR : 315/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

ABSTRAK : bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 telah ditetapkan dan diangkat Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 315/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Tanggal 24 Maret 2020 Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 315/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan ini adalah :Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/Kpu/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 serta memperhatikan

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID -19,

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 504/PP.04.2-BA/5102/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Tanggal 27 Maret 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 520/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 315/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

menetapkan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 520/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 315/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020
2. “Masa Kerja Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sama dengan masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan” menjadi “Menunda Masa Kerja Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan sejak Tanggal 1 April 2020 Sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut”.
3. Membayar honorarium Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020

CATATAN :

1. Perubahan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Pupuan Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, Untuk selengkapnya dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Keputusan KPU Kabupaten Tabanan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Maret 2020